



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 17 (<i>tujuh belas</i>)
Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 Desember 2019.
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI;2. Masukan dari Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 20203. Target penyelesaian <i>roadmap</i> Kementerian/Lembaga
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 10.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat produk dalam negeri melalui standardisasi nasional khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mempunyai daya saing yang tinggi.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN agar mempermudah proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan bantuan program pendampingan kepada pelaku usaha sektor UMKM dalam rangka mendapatkan sertifikasi SNI.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal pemanfaatan laboratoriumnya yang lebih berpihak kepada UMKM.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perdagangan melalui *e-commerce* khususnya produk impor.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk memperkuat peran SNI dalam penguatan ekspor dan membatasi masuknya impor barang yang kurang berkualitas dengan berkolaborasi dan bersinergi Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk mendorong terjadinya integrasi sertifikasi halal dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan SNI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 4 Desember 2019

KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103